

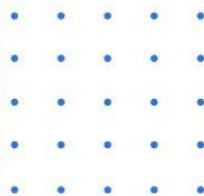


DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BONE

DIGITAL
MABESSA



DISKOMINF
KABUPATEN BONE



RENCANA KERJA TAHUN 2024





BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) disempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone

- Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41).
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2024-2026 yang merupakan Renstra peralihan bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Kerja adalah salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Rencana Kerja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) guna akselerasi pencapaian kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan "Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik Yang Akuntabel".

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renja yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Kerja yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.

Watampone, 20 Juli 2023

Kepala Dinas,



H. DARHAM, S.T., M.M.

NIP. 197407132009011003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	40
3.3. Cascading Kinerja	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
4.1. Program	49
4.2. Kegiatan	49
BAB V PENUTUP	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel TC-29 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
Tabel TC-30 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel TC-31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2024	31
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	41
Tabel TC-33 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja SKPD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra perangkat daerah), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat Tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, untuk perencanaan saat ini sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Maka, disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Renstra peralihan inilah yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Dokumen Renja Kerja sangat penting karena dokumen ini memberikan panduan yang jelas, fokus, dan terukur dalam mengimplementasikan rencana jangka menengah, serta memastikan bahwa kegiatan Organisasi Perangkat Daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Beberapa alasan mengapa Rencana Kerja Perangkat Daerah penting antara lain:

1. merupakan Langkah konkret dalam mengimplementasikan rencana jangka menengah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. membantu dalam menetapkan prioritas dan fokus kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun. Hal ini memastikan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
3. merinci program yang akan dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, dan Langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam jangka waktu satu tahun. Hal ini membantu dalam penyusunan rencana aksi, termasuk alokasi anggaran, penggunaan sumber daya, dan strategi pencapaian target;
4. memberikan kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dimana sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja digunakan sebagai acuan untuk menilai pencapaian hasil dan melakukan perbaikan jika diperlukan;
5. memungkinkan koordinasi dan kolaborasi antar Unit Kerja atau Perangkat Daerah lain dalam mencapai tujuan Bersama;
6. memberikan Informasi yang jelas kepada seluruh unit dalam Perangkat Daerah serta pihak-pihak terkait tentang apa yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya public, serta memungkinkan akuntabilitas terhadap pencapaian hasil;
7. membantu dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana. Dengan adanya rencana yang terperinci, kemajuan capaian Perangkat Daerah dapat dipantau secara berkala dan Langkah-langkah perbaikan dapat diambil jika ada kendala atau perubahan situasi.

Agar Rencana Kerja dapat berfungsi dengan baik bagi perangkat daerah, ada beberapa substansi dan muatan yang harus dipenuhi dalam penyusunannya antara lain:

1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ingin dicapai pada tahun rencana.
2. Rincian program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

3. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Indikator kinerja haruslah jelas, terukur, relevan, berkualitas, dan dapat dipantau secara periodik. Indikator kinerja membantu dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Rencana anggaran yang mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rencana anggaran harus mencakup estimasi biaya yang diperlukan masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan dan harus sejalan dengan kebijakan dan aturan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berlaku
5. Jangka waktu pelaksanaan serta lokasi setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. Jangka waktu pelaksanaan membantu dalam mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan secara efisien, serta memastikan target dapat dicapai sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
6. Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja atau instansi yang terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan saling mendukung, menghindari tumpang tindih, dan memanfaatkan sinergi yang ada.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setiap tahunnya paralel dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Koordinasi antar Instansi Pemerintah Kabupaten Bone dan Partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang secara berjenjang di tiap tingkatan Pemerintah mulai Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional.

Hasil Musrembang tersebut kemudian ditindak lanjuti Perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD Kabupaten Bone, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian/Lembaran terkait. Hasil Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai Pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam Proses Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap Tahun Anggaran.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap urusan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dalam pelaksanaan tugas pada ketiga bidang urusan yang kemudian tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja), yang disusun setiap tahun oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam bentuk kegiatan yang terperinci. Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan yang baik sehingga pelaksanaannya sejalan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat yang sangat besar akan komunikasi, teknologi informatika, persandian dan statistik yang berbasis elektronik di masa sekarang ini. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024 menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di masing-masing bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor

7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone 2024-2026. Selain itu, maksud penyusunan Renja Diskominfo antara lain:

1. Menjamin adanya konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan, monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi informatika, statistik dan persandian.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah agar perencanaan strategis atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sektor komunikasi informatika, statistik dan persandian Kabupaten Bone dapat lebih terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan sebagai alat untuk mencapai apa yang telah terjabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana

Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki uraian dan penjelasan masing-masing dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah menguraikan tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Target serta Pagu Indikatif Pendanaan Tahun 2024 yang disajikan dalam bentuk tabel.

Bab V Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 yang dilaksanakan untuk menunjang kinerja yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah program dan kegiatan yang berkaitan dengan Administrasi dan Tiga Bidang Urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu urusan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang mencakup perencanaan dan penganggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6,350,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,350,000 atau 100,00% dengan realisasi fisik 266,67% dari target 3 Dokumen perencanaan dan realisasi sebanyak 8 dokumen yaitu Laporan Musrembang SKPD 2023, Renja Perubahan 2022, Renja Pokok 2023, RKA Partial I 2022, Pra RKA Perubahan 2022, RKA Perubahan 2022, Pra RKA Pokok 2023, dan RKA Pokok 2023.
 - 2) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan pelaporan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68,804,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57,043,430 atau 82,91% dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target 3 Dokumen dan realisasi sebanyak 3 Dokumen yaitu LPPD, LKjIP, dan Laporan Evaluasi Renja.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang mencakup pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,375,966,199 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,323,401,749 atau 98,44% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
 - 2) Koordinasi Dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, sub kegiatan ini mencakup penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan laporan keuangan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,072,150 dan realisasi sebesar Rp. 15,309,700 atau 99,33% dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target 19 laporan dan realisasi sebanyak 19 laporan yaitu 12 Laporan bulanan, 4 Laporan triwulanan, 2 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mengampu 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, sub kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas/kemampuan ASN melalui keikutsertaan dalam pelaksanaan bimtek ataupun sosialisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,000,000 dan realisasi sebesar Rp. 4,750,000 atau 95,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mengampu 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sub kegiatan ini mencakup penyediaan alat listrik dan penerangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,660,000 dan realisasi sebesar Rp. 1,660,000 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
 - 2) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini mencakup seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109,239,249 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 109,229,249 atau 99,99% dengan realisasi fisik 100,00%. Jumlah alokasi anggaran yang besar dikarenakan peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone menggunakan sistem satu pintu.
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik kantor, sub kegiatan ini mencakup seluruh

kebutuhan makanan dan minuman meliputi makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 268,900,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 268,900,000 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman 31 orang ASN dan 36 orang tenaga kontrak yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone selama satu tahun.

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan ini mencakup kebutuhan barang cetak dan penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 50,708,250 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50,708,250 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan perjalanan Kepala Dinas, Sekretariat Dinas dan pelaksanaan perjalanan yang tidak dapat dicover oleh anggaran Bidang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241,104,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 216,365,832 atau 89,74% dengan realisasi fisik sebesar 211,67% dari target 60 kali terealisasi sebanyak 127 kali.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengampu 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502,243,330 dan realisasi sebesar Rp. 447,200,835 atau 89,04% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengampu 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini mencakup pembayaran jasa/upah kerja tenaga kontrak/sukarela dengan alokasi anggaran Rp. 255,518,400 dan realisasi sebesar Rp. 255,281,832 atau 99,91% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mengampu 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39,089,450 dan realisasi sebesar Rp. 36,885,350 atau 94,36% dengan realisasi fisik 100,00%.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp.

25,130,000 dan realiasi anggaran Rp. 25,130,000 atau 100,00% dengan realiasi fisik 100,00%.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 199,217,781 dan realisasi Rp. 199,000,000 atau 99,89% dengan realisasi fisik 100,00%.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Monitoring Opini Publik Dan Aspirasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pengaduan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat melalui aplikasi SPAN LAPOR dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,964,500 dan realiasi anggaran sebesar Rp. 16,612,100 atau 97,92% dengan realiasi fisik sebesar 206,06% dari target sebanyak 33 laporan dan tindak lanjut dengan realisasi sebanyak 68 laporan dan tindak lanjut.

- 2) Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan pendataan terhadap media komunikasi yang ada di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10,020,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,629,000 atau sebesar 96,10% dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target dan realiasi sebanyak 6 Kecamatan.

- 3) Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, sub kegiatan ini mencakup penyebaran informasi melalui konten dan berbagai media lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134,694,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 132,797,200 atau sebesar 98,59% dengan realisasi fisik sebesar 104,67% dari 3 indikator dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center dari target 150 publikasi terealisasi sebanyak 157 publikasi atau sebesar 104,67%;
- b) Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dari target 110 konten terealisasi sebanyak 121 konten atau sebesar 110,00%;
- c) Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan dari

target 15 layanan terealisasi sebanyak 17 layanan atau sebesar 113,33%.

- 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pengelolaan media komunikasi pemerintah yaitu Lembaga Penyiaran Pemerintah Radio Suara Bone Beradat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29,979,640 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29,792,640 atau sebesar 99,38% dengan realisasi fisik sebesar 400,00% dari target 4 program dan terealisasi sebanyak 16 program.
- 5) Pelayanan Informasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pengelolaan dan penyebaran informasi melalui PPID dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11,499,800 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,424,414 atau sebesar 90,65% dengan realisasi fisik sebesar 77,12% dari target jumlah dokumen informasi dan dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone sebanyak 500 dokumen dan terealisasi sebanyak 401 dokumen, hal ini disebabkan karena adanya maintenance pada aplikasi PPID pada dua bulan terakhir tahun berjalan yang menyebabkan penguploadan data tidak dapat dilakukan.
- 6) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, sub kegiatan ini mencakup pelayanan sound system seluruh OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24,054,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23,681,200 atau sebesar 98,45% dengan realisasi fisik sebesar 147,22% dari target jumlah pelayanan sound sistem dan mobil informasi yang terlaksana sebanyak 36 kegiatan terealisasi sebanyak 53 Kegiatan.
- 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, sub kegiatan ini mencakup pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok informasi masyarakat yang tersebar di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14,199,800 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14,039,800 atau sebesar 98,87% dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target jumlah kelompok informasi yang dibina sebanyak 20 kelompok terealisasi sebanyak 20 kelompok.
- 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas, sub kegiatan ini mencakup kerjasama dengan media massa, media cetak dan media online dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384,529,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 362,335,600 atau sebesar 94,23% dengan realisasi fisik sebesar 106,67%. Dari target 30 Media terealisasi sebanyak 32 Media.

3. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang mengampu 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, sub kegiatan ini mencakup penyediaan bandwidth ke Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi pembayaran jaringan dan pembangunan jaringan di OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,643,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,642,965,500 atau sebesar 99,99% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Dari target pembayaran jaringan 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan dan pembangunan 9 titik dengan realisasi sebanyak 9 titik pembangunan jaringan.
- 2) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini implementasi e-government Pemerintah Kabupaten Bone dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,566,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13,390,000 atau sebesar 98,70% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Dari target 1 (satu) Paket Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi) dengan realisasi sebanyak 1 (satu) paket.
- 3) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik, sub kegiatan ini mencakup pengelolaan dan implementasi SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21,074,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20,988,000 atau sebesar 99,59% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Dari target 1 (satu) aplikasi terintegrasi dengan realisasi sebanyak 1 (satu) aplikasi.
- 4) Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah, sub kegiatan ini mencakup peningkatan pengetahuan pengelola web, publikasi melalui web dan ketersediaan sub domain pada OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14,488,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14,390,000 atau sebesar 99,32% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Dari target 1 (satu) aplikasi terintegrasi dengan realisasi sebanyak 1 (satu) aplikasi.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektor, sub kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan dan penyusunan dokumen statistik sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59,198,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 56,173,800 atau sebesar 94,89% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi, sub kegiatan ini mencakup peningkatan mutu aparat pengelola data statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,667,500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7,234,500 atau sebesar 94,35% dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target jumlah peningkatan kapasitas Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Membangun Metadata Statistik Sektor, sub kegiatan ini mencakup penelitian dan pengumpulan metadata statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14,179,550 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14,179,550 atau sebesar 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target jumlah penelitian dan pengumpulan data statistik sektoral yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) dokumen.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan analisis dan assessment perangkat teknologi Informasi Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11,692,550 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,674,250 atau sebesar 91,29% dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target jumlah dokumen pelaksanaan analisis dan asesmen perangkat teknologi informasi persandian sebanyak 4 (empat) dokumen terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen.
 - 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik, sub kegiatan ini mencakup berita/Informasi dan jaringan yang diterima, diamankan, dan didistribusikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11,327,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,498,800 atau sebesar 92,69% dengan realisasi fisik sebesar

107,10% dari target jumlah berita/informasi dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu sebanyak 1.000 berita terealisasi sebanyak 1.071 berita.

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mengampu 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini mencakup penerimaan berita/Informasi melalui jaring Komunikasi sandi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22,766,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20,484,000 atau sebesar 89,98% dengan realisasi fisik sebesar 140,00% dari target jumlah berita yang diterima melalui JKS sebanyak 1.000 berita terealisasi sebanyak 1.400 berita.

(Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C. 29)

Tabel T-C. 29
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

- 1 Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP= BB
- 2 Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian= 100
- 3 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo= 75
- 4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah= 100
- 5 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)= 584

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
	2.16	Sub Urusan Komunikasi dan Informatika														
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	5.852.517.670	101,00%	5.118.067.205	100,00%	5.164.344.359	120,47%	5.017.216.227	221,13%	10.135.283.432	221,13%	196,25%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	8	77.000.000	9	59.060.350	6	75.154.000	11	63.393.430	20	122.453.780	250,00%	159,03%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	5	42.000.000	6	30.802.550	3	6.350.000	8	6.350.000	14	37.152.550	280,00%	88,46%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik	3	35.000.000	3	28.257.800	3	68.804.000	3	57.043.430	6	85.301.230	200,00%	243,72%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3.786.978.000	100,00%	3.489.019.846	100,00%	3.391.379.899	92,41%	3.338.711.449	192,41%	6.827.731.295	192,41%	180,29%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, yang dijamin pemeliharaan kesehatannya setiap bulan	40	3.756.978.000	35	3.472.947.696	37	3.375.966.199	33	3.323.401.749	68	6.796.349.445	170,00%	180,90%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	19	30.000.000	19	16.072.150	19	15.413.700	19	15.309.700	38	31.381.850	200,00%	104,61%	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung	100%	20.000.000	100,00%	1.550.000	100,00%	5.000.000	100,00%	4.750.000	200,00%	6.300.000	200,00%	31,50%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek (orang)	4	20.000.000	2	1.550.000	1	5.000.000	1	4.750.000	3	6.300.000	75,00%	31,50%	
			Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	2		2		2		2		4		200,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	100%	540.000.000	110,85%	514.266.250	100,00%	671.611.499	158,26%	646.863.331	269,11%	1.161.129.581	269,11%	215,02%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli	11	23.000.000	11	6.253.500	5	1.660.000	5	1.660.000	16	7.913.500	145,45%	34,41%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	32	170.000.000	32	113.857.850	32	109.239.249	32	109.229.249	64	223.087.099	200,00%	131,23%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang di beli	14	120.000.000	14	216.944.050	14	268.900.000	14	268.900.000	28	485.844.050	200,00%	404,87%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	4	27.000.000	4	20.344.400	4	50.708.250	4	50.708.250	8	71.052.650	200,00%	263,16%	
		Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang di ikuti	130	200.000.000	147	156.866.450	60	241.104.000	127	216.365.832	274	373.232.282	210,77%	186,62%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.041.807.670	93,75%	764.155.100	100,00%	502.243.330	100,00%	447.200.835	193,75%	1.211.355.935	193,75%	116,27%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di beli	14	1.041.807.670	13	764.155.100	14	502.243.330	14	447.200.835	27	1.211.355.935	192,86%	116,27%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	293.732.000	100,00%	235.704.860	100,00%	255.518.400	100,00%	255.281.832	200,00%	490.986.692	200,00%	167,15%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang di bayarkan perbulan	432	293.732.000	432	235.704.860	432	255.518.400	432	255.281.832	864	490.986.692	200,00%	167,15%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	93.000.000	100,00%	54.310.799	100,00%	263.437.231	142,62%	261.015.350	242,62%	315.326.149	242,62%	339,06%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	48.000.000	3	38.130.899	3	39.089.450	3	36.885.350	6	75.016.249	200,00%	156,28%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	5	45.000.000	5	16.179.900	4	25.130.000	8	25.130.000	13	41.309.900	260,00%	91,80%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		836	200.436.000			418	199.217.781	418	199.000.000	418	199.000.000	50,00%	99,28%	

2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	1.277.374.470	101,11%	1.130.668.340	85,00%	625.940.740	104,88%	599.311.954	205,99%	1.729.980.294	205,99%	135,43%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	1.277.374.470	101,11%	1.130.668.340	85,00%	625.940.740	89,15%	599.311.954	190,26%	1.729.980.294	190,26%	135,43%	
		Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti	36	67.000.000	55	38.092.850	33	16.964.500	68	16.612.100	123	54.704.950	341,67%	81,65%	
			Jumlah Pengaduan yang di terima			55		33		68		123				
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	6	25.000.000	6	12.281.200	6	10.020.000	6	9.629.000	12	21.910.200	200,00%	87,64%	
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center	200	145.000.000	394	235.195.100	150	134.694.000	157	132.797.200	551	367.992.300	275,50%	253,79%
		Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		130		90		110		121		211		162,31%		
		Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		20		10		15		17		27		135,00%		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	4	100.000.000	4	85.929.240	4	29.979.640	16	29.792.640	20	115.721.880	500,00%	115,72%	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone	550	55.000.000	503	25.926.750	520	11.499.800	401	10.424.414	904	36.351.164	164,36%	66,09%	
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	23		23		23		23						
			Jumlah data yang dapat berbagi pakai	9		9		9		9		18		200,00%		
			Jumlah layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	8		8		8		8		16		200,00%		
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1		3		1		1		4		400,00%		
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksana	40	75.000.000	35	37.627.600	36	24.054.000	53	23.681.200	88	61.308.800	220,00%	81,75%	
		Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	42	30.000.000	34	17.947.850	20	14.199.800	20	14.039.800	54	1.987.650	128,57%	106,63%	

		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan	32	780.374.470	35	677.667.750	30	384.529.000	32	362.335.600	67	1.040.003.350	209,38%	133,27%	
			Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	32		35		30		32		67		209,38%		
3	meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85%	1.795.994.615	75,58%	1.510.166.260	75,00%	1.692.128.000	112,82%	1.691.733.500	188,40%	3.201.899.760	221,65%	178,28%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota	100%	1.795.994.615	101,55%	1.510.166.260	100,00%	1.692.128.000	119,93%	1.691.733.500	221,48%	3.201.899.760	221,48%	178,28%	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik pengadaan Kapasitas Bandwidtdtch 275 s.d 400 Mbps di kabupaten kota	9	1.690.994.615	57	1.462.674.560	9	1.643.000.000	9	1.642.965.500	66	3.105.640.060	733,33%	183,66%	
			Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	57		48		48		55		103		180,70%		
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	57		48		48		55		103		180,70%		
			Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	65		65		65		65						
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan Pusat data Pemerintah	65		65		65		65		130		200,00%		
			Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	65		65		65		65		130		200,00%		
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi)	1	35.000.000	1	17.141.700	1	13.566.000	1	13.390.000	200,00%	30.531.700	200,00%	87,23%	
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	7		7		7		10		17		242,86%		
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terintegrasi	2	35.000.000	1	15.175.000	1	21.074.000	1	20.988.000	2	36.163.000	100,00%	103,32%	

			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	39		32		39		39		71		182,05%		
			Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	27		23		25		25		48		177,78%		
			Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5		3		4		4		7		140,00%		
			Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	6		4		5		5		9		150,00%		
		Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website,Vidcom)	2	35.000.000	2	15.175.000	1	14.488.000	1	14.390.000	3	29.565.000	150,00%	84,47%	
			Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara	420		400		410		564		964		229,52%		
			Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	65		65		65		65		130		200,00%		
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	129.000.000	95,00%	102.323.900	100,00%	81.045.050	100,00%	77.587.850	195,00%	179.911.750	195,00%	139,47%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	1	129.000.000	95,00%	102.323.900	100,00%	81.045.050	100,00%	77.587.850	195,00%	179.911.750	195,00%	139,47%	
		Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Jumlah dokumen yang disusun	5	55.000.000	3	36.943.500	3	59.198.000	3	56.173.800	6	93.117.300	120,00%	169,30%	
			Tersedianya Buku Profil Daerah (Dokumen)	2		2		2		2		4		200,00%		
			Jumlah Survey statistik sektoral yang dilakukan (Kegiatan)	1		1		1		1		2		200,00%		
			Jumlah Kompilasi Statistik sektoral yang dilakukan (Dokumen)	1		1		1		1		2		200,00%		
			Jumlah Survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS (Kegiatan)	1		1		1		1		2		200,00%		
			Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS (Kegiatan)	1		1		1		1		2		200,00%		

		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat (orang)	3	37.000.000	1	32.863.500	1	7.667.500	1	7.234.500	2	40.098.000	66,67%	108,37%	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	2	37.000.000	2	32.516.900	1	14.179.550	1	14.179.550	3	46.696.450	150,00%	126,21%	
			Jumlah Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik sektoral (Kegiatan)	3		3		3		3		6		200,00%		
			Jumlah Kelengkapan Metadata Variabel dektoral (Variabel)	90		50		60		60		110		122,22%		
5	Terselenggaranya Tata Kekola Persandian Daerah dengan Baik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	120.000.000	116,57%	83.244.500	100,00%	45.785.550	122,69%	41.657.050	239,26%	124.901.550	239,26%	104,08%	Dinas Kominfo dan Persandian
		Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	60.000.000	125,44%	36.877.750	100,00%	23.019.550	105,38%	21.173.050	230,82%	58.050.800	230,82%	96,75%	
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian	4	27.000.000	4	17.564.900	4	11.692.550	4	10.674.250	8	28.239.150	200,00%	104,59%	
			Jumlah Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem Manajemen yang telah menerapkan Prinsip-prinsip manajemen keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah Daerah	39		39		39		39		78		200,00%		
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Berita/Informasi dan dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu	1.000	33.000.000	1.303	19.312.850	1.000	11.327.000	1.071	10.498.800	2.374	29.811.650	237,40%	90,34%	
			Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	66		43		52		52		95		143,94%		
			Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	66		57		57		57		114		172,73%		

		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	100%	60.000.000	107,70%	46.366.750	100,00%	22.766.000	140,00%	20.484.000	247,70%	66.850.750	247,70%	111,42%	
		Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	1.000	60.000.000	1.077	46.366.750	1.000	22.766.000	1.400	20.484.000	2.477	66.850.750	247,70%	111,42%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										151,27%	7.427.506.581					

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah instansi yang membidangi 3 (tiga) urusan yaitu komunikasi informatika, statistik dan persandian melaksanakan tugas dalam menjamin dan menyelenggarakan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi pemerintah maupun masyarakat, ketersediaan data statistik yang valid dan menjamin keamanan persandian pemerintah. Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tabel berikut:

Tabel T-C. 30
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1) <i>Kedadaan TRWI</i>	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP/Nilai SAKIP	-	-	BB	BB	85,50-86,50	86,50-87,75	A*	A*	85,50	86,50	
2.	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	-
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	75	85	-	-	84,62	84,62	-	-	-
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	-
5.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	584	600	605	610	585	600*	605	610	-
6.	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi	-	-	-	-	Cukup Informatif (61,00-69,99)	Cukup Informatif (70,00-79,99)	-	-	Cukup Informatif (61,00)	Cukup Informatif (70,00)	-
7.	Self Assesment Indeks SPBE	-	-	-	-	3,00	3,15	-	-	3,00	3,15	-

8.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	-	-	-	-	2,00	2,20	-	-	2,00	2,20	-
----	--	---	---	---	---	------	------	---	---	------	------	---

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Inspektorat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah

Salah satu tantangan terbesar Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian saat ini adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Peralihan tata kelola pemerintah menuju era digital berpotensi menimbulkan ancaman keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik. Inovasi-inovasi baru juga bermunculan pada era digital, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respon dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya. Pelaksanaan E-government juga harus didukung dengan sistem pengamanan informasi, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persandian.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas berita atau dokumen pemerintah. Hal ini sangat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan bergantung atas dukungan penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-udgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai berikut:

1. Pemenuhan variabel penilaian domain SPBE masih belum optimal;
2. Masih rendahnya aplikasi yang terintegrasi;
3. Masih rendahnya predikat nilai keterbukaan Informasi;
4. Masih belum optimalnya penyediaan dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi;
5. Tingginya ancaman terhadap keamanan siber dan informasi pemerintah daerah;
6. Pemenuhan target kinerja program teknis Perangkat Daerah belum optimal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ke depan dan berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, terdapat beberapa dinamika tantangan, peluang, dan isu-isu strategis guna mempertajam kebijakan yang akan diambil untuk mendukung pencapaian target dan sasaran.

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah, sederhana dan transparan;
2. Kurangnya pemahaman Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik;
3. Belum adanya penerapan data terintegrasi
4. Masih lemahnya jejaring informasi khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan hoax;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebutuhan akan informasi;
6. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kabupaten Bone;
7. Tuntutan peningkatan integrasi data (Bone Satu Data) untuk menunjang e-Governance dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
8. Tuntutan penerapan manajemen keamanan informasi yang handal;
9. Tuntutan peningkatan kapasitas SDM yang handal dan profesional dalam bidang Informasi Teknologi dan Keamanan TIK.

2.4.2. Peluang

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Bone berbasis elektronik;
2. Penguatan pemahaman Lembaga Publik khususnya Perangkat Daerah terkait keterbukaan informasi publik dan dukungan seluruh pihak untuk peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.
3. Pengembangan muatan e-Government dengan integrasi data;

4. Partisipasi dan kemitraan komunikasi antar Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam pencegahan dan penangkalan hoax;
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi dan komunikasi;
6. Pengembangan TIK dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bone berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Mewujudkan Bone Satu Data melalui aplikasi data yang terintegrasi dan mewujudkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai walidata;
8. Meningkatkan Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian untuk menjamin keamanan informasi pemerintah;
9. Pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan bidang TIK.

2.4.3. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selaku PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bone agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

2. Pelaksanaan literasi informasi guna mencegah terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar (hoax).

Maraknya terorisme dan isu-isu yang tidak benar (*hoax*) di masyarakat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi teroris

tersebut membuat masyarakat tidak aman dan nyaman. Ideologi Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk, pandangan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang *komprehensif*. Mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat memicu tumbuh suburnya terorisme di Indonesia. Diperlukan literasi informasi tentang penanaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat untuk meminimalisir terorisme dalam masyarakat.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pendukung transformasi digital pemerintahan.

SPBE Merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Namun untuk menjawab tantangan transformasi digital yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone perlu melakukan beberapa upaya strategis dalam pengelolaan SPBE. Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih belum lengkap.

4. Pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai wujud kesatuan pemakaian data pembangunan yang terpadu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai *fasilitator* yang berfungsi untuk menjembatani semua *stakeholder* dalam berkontribusi untuk mewujudkan tujuan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi

sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan *Big Data* untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone merencanakan penggunaan *Big Data (Bone Satu Data)* untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik lebih maksimal. Sebagai Langkah awal, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

5. Pembangunan infrastruktur teknologi guna membangkitkan potensi masyarakat Kabupaten Bone

Dengan supporting Teknologi Informasi diharapkan peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peran masyarakat saat ini tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah mendistribusikan bandwidth yang tersebar di 38 OPD, 2 Rumah Sakit dan 15 Kecamatan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh aparat dalam pelaksanaan kegiatan secara online. Terdapat 2 CCTV yang dikontrol oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melalui ruang server. Pemerintah Daerah juga menyediakan berbagai fasilitas dan sarana penunjang seperti penyediaan WiFi gratis di beberapa titik ramai pengunjung di Kabupaten Bone.

6. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah merencanakan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan

integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 terdapat beberapa *layer* diantaranya: *wearable tech*, *advance robotic*, *3D printing*, *AI*, dan *IoT*. Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap *malware*. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan *IoT* di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel T-C. 31 di bawah:

Tabel T-C. 31
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100%	4.680.267.870	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100%	7.110.379.800	
A	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	118.759.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.546.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.492.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	80.000.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	100%	3.934.088.020	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	100%	3.969.088.020	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.919. 088.020	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.919.088.020	

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	35.000.000	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	58.136.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	126.886.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	750.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35 Paket	24.500.000	
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	52.386.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	52.386.000	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	169.454.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	1.025.000.000	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.938.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.855.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.000.000	

12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	869.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	12 Paket	54.140.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.000.000	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.363.150	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	
15	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.414.000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	1 Dokumen	3.874.5000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	12 Dokumen	90.000.000	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.400.000.000	
17	Pengadaan Mebel	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	1.200.000.000	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100%	309.518.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100%	383.620.800	

19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297.518.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	371.620.800	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	100%	119.071.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	100%	570.000.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80.000.000	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	40.000.000	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	4.710.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	50.000.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	79.361.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik • Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah 	100%	471.976.500	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi • Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah 	100%	1.764.269.290	

			Kabupaten					Kabupaten			
A	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	100%	471.976.500	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	100%	1.764.269.290	
1	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	17.000.000	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	500.000.000	
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	3.000.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	24.531.000	
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	130.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	249.999.900	
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	76.185.140	
5	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	15.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	99.999.250	
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	30.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	87.554.000	
7	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	5.000.000	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	55 Orang	121.000.000	
8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan Kebijakan	12 Dokumen	251.976.500	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan Kebijakan	12 Dokumen	605.000.000	

III	Program Aplikasi Informatika	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi 	100% 35,71%	1.228.343.650	Program Aplikasi Informatika	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	100% 35,71%	1.945.073.000	
A	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100%	1.149.093.650	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100%	1.752.873.000	
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	n/a Domain	5.000.000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	n/a Domain	46.855.500	
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	60.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	97.000.000	
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	1.084.093.650	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	1.609.017.500	
B	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup OPD Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara on Line dan Terintegrasi 	100% 100%	43.220.000	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup OPD Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara on Line dan Terintegrasi	100% 100%	192.200.000	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	44.250.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	50.000.000	

2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	44.250.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	112.200.000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	12 Dokumen	30.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	12 Dokumen	30.000.000	
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah • Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah • Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah 	100% 100% 100%	85.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah • Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah • Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah 	100% 100% 100%	316.575.050	
A	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	100%	85.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	100%	316.575.050	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	12 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	104.452.000	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	10.069.500	
3	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	5.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	105.924.000	

4	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	12 Dokumen	25.000.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	12 Dokumen	96.129.550	
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	50.000.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	210.218.250	
A	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Laporan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	35.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Ketersediaan Laporan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	157.609.000	
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	34.741.000	
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	12 Laporan	122.868.000	
B	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	100%	15.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	100%	52.609.250	
3	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	65 Perangkat Daerah	15.000.000	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	65 Perangkat Daerah	52.609.250	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Meskipun demikian, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam menyusun rencana program dan kegiatan terutama dalam hal kebutuhan jaringan pada area publik.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain dari pada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini Program dan kegiatan yang terkait kebijakan Nasional tersebut belum terlaksanakan secara optimal. Kedua kebijakan dan Program Nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang perlu dijadikan sebagai salah satu Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan sistem Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang ditarik dari RPD Pemerintah Kabupaten Bone telah dirumuskan secara rinci pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.

3.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ditarik dari Tujuan 1 RPD Kabupaten Bone Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dari tujuan tersebut, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan Tujuan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel dengan indikator Indeks SPBE.

3.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Dinas Komunikasi Informatikadan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indiaktor Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel	Indeks SPBE	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi Oleh Komisi Informasi
			Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Self Assesment Indeks SPBE
			Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

Tujuan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel dengan indikator Indeks SPBE dimana Indeks SPBE yang

dimaksud dalam hal ini adalah hasil penilaian atau evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Domain dalam penilaian evaluasi SPBE terdiri dari domain kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator nilai SAKIP, dimana nilai tersebut diperoleh melalui penilaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat lebih independent, efektif, dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah. Penilaian dilakukan menggunakan lembar Evaluasi yang memuat pernyataan-pernyataan dan evidence penerapan SAKIP pada OPD.

Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi Oleh Komisi Informasi yang didapatkan melalui pemeringkatan Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Peringkat keterbukaan informasi bagi Badan Publik adalah suatu tools yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode Monev Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik menggunakan klasifikasi (*clustering*) menjadi 5 (lima) *cluster*, yaitu: informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Klasifikasi (*clustering*) dibagi menjadi 5 (lima) *cluster* yang ditentukan oleh skoring nilai keterbukaan informasi. Sedangkan skor monitoring dan evaluasi Badan Publik diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan penilaian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi pada setiap Badan Publik di wilayah Indonesia.

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Self Assesment Indeks SPBE, dimana nilai

tersebut diperoleh dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dibentuk berdasarkan SK Bupati dengan anggota tim dari lintas OPD Pemerintah Kabupaten Bone. Indeks ini mengacu pada indeks SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi untuk semua Pemerintahan di seluruh Indonesia. Nilai Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral dengan indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Oleh BPS. EPSS merupakan salah satu bentuk penguatan tata Kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah. Selain itu, penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas serta pencapaian sasaran RB Nasional “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta. Tujuan dari EPPS ini adalah mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, mendapatkan satu Ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik serta digunakan untuk menyusun strategi pembinaan data statistic oleh BPS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian dengan indikator Indeks Keamanan Informasi. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan Evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan Informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses Evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

1. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan;
2. Tata Kelola Kemanan Informasi;

3. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi;
4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
5. Pengelolaan Aset Informasi;
6. Teknologi dan Keamanan Informasi;
7. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek pengamanan keterlibatan pihak ketiga penyedia layanan, pengamanan layanan infrastruktur awan (cloud service) dan perlindungan data pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan Informasi kepada Pimpinan Instansi.

3.3 Cascading Kinerja

Cascading kinerja merujuk pada proses menghubungkan dan mengintegrasikan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Prinsip cascading kinerja adalah untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi ditransformasikan menjadi tujuan, sasaran, dan Tindakan konkret di seluruh unit dan individu dalam suatu organisasi. Dalam praktiknya, penyusunan cascading kinerja dimulai dari penetapan tujuan dan indikator tujuan, penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran OPD dan indikatornya, dan seterusnya hingga ke penetapan sasaran program, Kegiatan, dan sub Kegiatan beserta indikator kinerjanya. Adapun cascading kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

CASCADING KINERJA RENJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BONE

TUJUAN RPD KAB. BONE	MENCiptakan TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN BAIK DAN BERORIENTASI PELAYANAN												
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI												
SASARAN RPD KAB. BONE	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH												
	NILAI SAKIP KABUPATEN												
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF												
INDIKATOR SASARAN	INDEKS PELAYANAN PUBLIK												
TUJUAN RENSTRA	MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG AKUNTABEL												
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS SPBE												
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelengga raan Pemerintahan	Meningkatnya Penyelengga raan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi			
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP						Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi	Self Assessment Indeks SPBE	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Indeks Keamanan Informasi			
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATKA DAN PERSANDIAN												
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Aplikasi Informatika	Program Penyelenggaraan statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
SASARAN PROGRAM	Tercapainya target kinerja Program Teknis Perangkat Daerah						Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan			
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)						Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan	Persentase Aplikasi yang terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah			
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS						Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Bidang Teknologi Informatika	Bidang Statistik	Bidang Persandian			
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sendi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN KEGIATAN	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Persentase Sub Domain yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Meningkatnya Pengelolaan E-Government Lingkup OPD Kabupaten Bone	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Tersedianya Laporan Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
INDIKATOR KEGIATAN	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodek Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodek Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase Sub Domain yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Persentase Layanan Publik yang Diintegrasikan Secara on Line dan Terintegrasi Persentase Pengelolaan E-Government Lingkup OPD Kabupaten Bone	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Laporan Informasi Pemerintah Daerah yang Diamankan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Pola Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	Kasubag Program	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian					Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Bidang Teknologi Informatika		Bidang Statistik	Bidang Persandian	
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Analisis Kebutuhan untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengolahan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Mebel	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengolahan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengolahan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
SUB KEGIATAN 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
SUB KEGIATAN 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtlar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Pengembangan Infrastruktur		

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Peruntukan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Berkembangnya Infrastruktur		
Indikator 1 SUB KEGIATAN 3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Infrastruktur Statistik		
SUB KEGIATAN 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 4				Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 4				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		
SUB 5 KEGIATAN 1				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Pelayanan Informasi Publik					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 5				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 5				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					
SUB 6 KEGIATAN 1				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 6				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersedianya Dokumen Kemitraan dengan Pemangku kepentingan					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 6				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Dokumen Kemitraan Pemangku Kepentingan					
SUB 7 KEGIATAN 1				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 7				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Tersedianya Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 7				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Sumberdaya Komunikasi Publik yang Meningkatkan kapasitasnya					

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB 8 KEGIATAN 1								Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 8								Tersedianya Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 8								Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan komunitas dalam mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan					
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kasubag Program	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian					Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Bidang Teknologi Informatika	Bidang Statistik	Bidang Persandian		

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Bimtek Bagi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Layanen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolan E-Government Pemerintah Kab. Bone		Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten	Pengamanan Informasi Pemerintah Kab. Bone	Pola Hubungan Komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
STAKEHOLDER TERKAIT	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektoral Daerah 8. Bagian Organisasi Setda Kab. Bone 9. Bagian Tapem Setda Kab. Bone 10. Dinas Kominfo Prov. Sul-Sel 11. Kementerian Kominfo	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. Bappeda Kab. Bone 5. Diskominfo Prov. Sul-Sel	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKPSDM Kab. Bone 4. Diskominfo SP Prov Sul-Sel 5. Lembaga Diklat Resmi bagi ASN	1. Bupati & Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. Inspektoral Daerah 5. ULP Kab. Bone 7. Media 8. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. ULP Kab. Bone 4. Penyedia Barang/ Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. BKPSDM Kab. Bone	1. Bupati & Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. ULP Kab. Bone 4. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. Sekrestris Daerah Kab. Bone 3. OPD Kab. Bone 4. Pemerintah Desa Masyarakat Umum 5. Kecamatan dan Kelurahan 7. Diskominfo SP Prov. Sul-Sel 8. KPDD Sul-Sel 9. Komisi Informasi 10. Ombudsman 11. Kementerian Terkait 12. Media 13. Penyedia Barang/ Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. OPD Kab. Bone 3. Diskominfo Prov. Sul-Sel 3. Kementerian PAN RB	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. Bappeda Kab. Bone 3. Badan Pusat Statistik 4. Bapelitbangda Prov. Sul-Sel 5. Diskominfo SP Prov. Sul-Sel 5. Penyedia Barang/ Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. OPD Kab. Bone 3. Diskominfo SP Prov. Sul-Sel	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. OPD Kab. Bone 3. Diskominfo SP Prov. Sul-Sel	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara substansial Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, memuat tentang arah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja), dan secara faktual menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi infromatika, statistik dan persandian.

Faktor-faktor yang menjadi bahan Rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2024-2026 yang direncanakan terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Uraian lebih jelas dan terinci dapat dilihatsebagai berikut:

4.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 ditetapkan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program strategis Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Bone adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik;
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 7) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Mebel; dan
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang

terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:

- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:

- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
- 4) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 8 (delapan) subkegiatan, yaitu:

- 1) Subkegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
- 2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
- 3) Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
- 4) Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- 5) Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- 6) Subkegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
- 7) Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
- 8) Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:

- 1) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

- b. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE;
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, didukung oleh 1 (satu) Kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor;
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - 3) Pengembangan Infrastruktur;
 - 4) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah.
 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Subkegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 33
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								6.380.588.020			8.217.585.882		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.680.267.870			6.339.911.732		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								30.000.000			33.000.000		
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.500.000
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.500.000
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	19 Laporan	25 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	22.000.000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.934.088.020			4.327.496.822		

2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	33 orang/bulan	100 Persen	3.919.088.020	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	4.310.996.822
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.0000
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	18 Laporan	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11.000.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								58.136.000				63.949.600
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 Persen	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	825.000
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Orang	100 Persen	52.386.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	57.624.600

2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Orang	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5.500,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								169.454.450				181.776.540	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 Persen	1.938.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.131.800
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	34.855.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.340.830
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Paket	100 Persen	869.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	956.450
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	54.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	54.054.000
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	8.363.150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.076.110
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	65.414.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	71.955.400

						Tinggi (Minimal 76%)		Umum pada Perangkat Daerah										
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	3.874.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	1 Dokumen	4.261.950
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							60.000.000						66.000.000
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 Unit	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5.500.000
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disdiakan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 Persen	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disdiakan	3 Unit	60.500.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							309.518.400						313.708.560
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	297.518.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.508.560
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							119.071.000						398.486.660
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Unit	100 Persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	12 Laporan	300.508.560

					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tinggi (Minimal 76%)	dan Dibayarkan Pajaknya	Perangkat Daerah								Dibayarkan Pajaknya		
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.500.000
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	8 Unit	100 Persen	4.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.181.000
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 Persen	79.361.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	87.297.100
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							471.976.500			519.174.150			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							471.976.500			519.174.150			
2	16	01	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik• Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	18.700.000
2	16	01	2.01	0003	Monitoring Informasi dan	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Penyebarluasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Persentase Ketersediaan Data	Kab. Bone, Tanete Riattang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	3.000.000	Dana Transfer		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	12 Dokumen	3.300.000

					Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Informasi dan Komunikasi Publik • Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Komunikasi dan Informasi Publik	Barat, Macanang					Umum-Dana Bagi Hasil		Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		
2	16	01	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	• Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik • Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	143.000.000
2	16	01	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	• Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik • Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	22.000.000

2	16	01	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten 	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	16.500.000
2	16	01	2.01	0008	Kemitraan dan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten 	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemangku Kepentingan	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Kemitraan dan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	33.000.000
2	16	01	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas 	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	30 Orang	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	5.500.000

						Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten												
2	16	01	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<ul style="list-style-type: none">Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi PublikPersentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	251.976.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	277.174.150
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								1.228.343.650					1.358.500.000
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1.149.093.650					1.265.000.000
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">Persentase Aplikasi Pemerintahan yang TerintegrasiPersentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabuapten/Kota	Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Domain	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabuapten/Kota	1 Domain	5.500.000
										100 Persen								
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">Persentase Aplikasi Pemerintahan yang TerintegrasiPersentase Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.500.000
										100 Persen								

						Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Kabupaten/Kota											
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">Persentase Aplikasi Pemerintahan yang TerintegrasiPersentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	1.084.093.650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.254.000.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							79.250.000				93.500.000		
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">Persentase Aplikasi Pemerintahan yang TerintegrasiPersentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara on Line dan TerintegrasiPersentase Pengelolaan E-Government Lingkup OPD Kabupaten Bone	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	44.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	55.000.000
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">Persentase Aplikasi Pemerintahan yang TerintegrasiPersentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara on Line dan TerintegrasiPersentase Pengelolaan E-Government Lingkup OPD Kabupaten Bone	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.500.000

						oleh Dinas Kominfo												
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi• Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara on Line dan Terintegrasi• Persentase Pengelolaan E-Government Lingkup OPD Kabupaten Bone	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	33.000.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							85.000.000				93.500.000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							85.000.000				93.500.000		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							85.000.000				93.500.000		
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah• Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah• Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen 100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	55.500.000

2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah 	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Orang	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	5.500.000
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan 	Jumlah Infrastruktur Statistik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Unit	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	5.500.000

						Daerah • Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah				100 Persen								
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah• Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah• Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Dihimpun	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Data Statistik Daerah yang Dihimpun	12 Dokumen	27.500.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								50.000.000					55.000.000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								50.000.000					55.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								35.000.000					38.500.000
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan	Tingkat Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan	Persentase Ketersediaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat,	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan	12 Dokumen	16.500.000

					Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Macanang						Dana Bagi Hasil		Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Ketersediaan Laporan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Dokumen	22.000.000	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								15.000.000	16.500.000					
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Persentase Ketersediaan Laporan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	65 Perangkat Daerah	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	65 Perangkat Daerah	16.500.000	
Jumlah													6.515.588.020	8.366.085.882					

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam kurun waktu satu tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026. Dokumen Renja ini merupakan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone, dokumen ini disusun dengan merujuk dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Program dan kegiatan yang tertuang dan ditetapkan dalam Dokumen Renja ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, untuk itu perlu komitmen bagi semua pihak terutama jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkannya. Akhirnya, semoga Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good government dan good governance.

Guna mewujudkan tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2024-2026 yang diampu yaitu ***"MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN BAIK DAN BERORIENTASI PELAYANAN"*** dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menuangkan ke dalam Renstra dengan bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan Tahun 2024. Apabila terdapat kekurangan dalam hal penulisan dan penyampaian kami mengharapkan sumbang saran dari pembaca yang bersifat membangun bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan dengan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone diharapkan perencanaan pembangunan urusan Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bone dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BONE
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						6.515.588.020,00							8.366.085.882,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.515.588.020,00							8.366.085.882,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6.380.588.020,00							8.217.585.882,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	100 % 100 % 100 %			100 %	4.680.267.870,00						100 % 100 % 100 %	6.339.911.732,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinaskominfo	100 %	33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen			4 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinaskominfo	5 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan			33 Orang/bulan	3.919.088.020,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Keuangan dinas komunikasi Informatika dan Persandian	35 Orang/bulan	4.310.996.822,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Keuangan dinas komunikasi Informatika dan Persandian	1 Laporan	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Laporan			18 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Keuangan dinas komunikasi Informatika dan Persandian	18 Laporan	11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %			100 %	58.136.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaynan Administrasi Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100 %	63.949.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	107 Paket			1 Paket	750.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaynan Administrasi Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	35 Paket	825.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			2 Orang	52.386.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelaynan Administrasi Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2 Orang	57.624.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	34.855.300,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Paket	38.340.830,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	869.500,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1 Paket	956.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	54.140.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Paket	54.054.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	8.363.150,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Paket	10.076.110,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	65.414.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Laporan	71.955.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen			1 Dokumen	3.874.500,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Dokumen	4.261.950,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %			100 %	60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100 %	66.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	3 Unit	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit			1 Unit	55.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	9 Unit	60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100 %			100 %	309.518.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Jasa Penunjang Dinaskomunikasi Informatika dan Persandian	100 %	313.708.560,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Jasa Penunjang Dinaskomunikasi Informatika dan Persandian	12 Laporan	13.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	297.518.400,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Jasa Penunjang Dinaskomunikasi Informatika dan Persandian	12 Laporan	300.508.560,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	119.071.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah Dinaskomunikasi Informatika dan Persandian	100 %	398.486.660,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	6 Unit			2 Unit	30.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah Dinaskomunikasi Informatika dan Persandian	2 Unit	300.508.560,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit			1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah Dinaskomunikasi Informatika dan Persandian	1 Unit	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen			12 Dokumen	17.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	18.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	36 Dokumen			12 Dokumen	3.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	3.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	36 Dokumen			12 Dokumen	130.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	143.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya</i>	180 Orang			30 Orang	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola p emerintaha n dan pelaya n publik 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	36 Dokumen			12 Dokumen	251.976.500,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola p emerintaha n dan pelaya n publik 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	277.174.150,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Persentase Organnisasi Perangkat daerah (OPD) yang Terhubung dengan Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi</i>	71,43 % 71,43 % 100 % 71,43 % 100 % 100 %			100 % 35,71 %	1.228.343.650,00						57,14 % 57,14 % 100 % 57,14 % 100 % 100 %	1.358.500.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Sub Domain yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</i>	100 %			100 %	1.149.093.650,00			Memperkua t Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola p emerintaha n dan pelaya n publik 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Domain Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.265.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	n/a Domain			n/a Domain	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Domain Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a Domain	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen			12 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Domain Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	36 Unit			12 Dokumen	1.084.093.650,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Domain Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	1.254.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Pengelolaan Egovernment Lingkup OPD Kabupaten Bone	100 % 100 % 100 %			100 % 100 %	79.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 % 100 %	93.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen			12 Dokumen	44.250.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	36 Dokumen			12 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</i>	36 Dokumen			12 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						85.000.000,00							93.500.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perrancangan Pembangunan Daerah Persentase OPD yang Menggunakan dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	85.000.000,00						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	93.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	100 %			100 %	85.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %	93.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	36 Dokumen			12 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	12 Orang			1 Orang	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Infrastruktur Statistik</i>	3 Unit			1 Unit	5.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>	36 Dokumen			12 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						50.000.000,00							55.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</i>	100 % 100 %			100 %	50.000.000,00						100 % 100 %	55.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %			100 %	35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	38.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	65 Perangkat Daerah			65 Perangkat Daerah	15.000.000,00	- Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	65 Perangkat Daerah	16.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	JUMLAH							6.515.588.020,00						8.366.085.882,00		



TEKNOLOGI INFORMASI

